

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran Perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi semakin mendapat perhatian baik di tingkat global maupun nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) menegaskan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu pilar dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Goal 5): *Achieve gender equality and empower all women and girls* (Johnston, 2016). SDGs menekankan bahwa peningkatan peran dan kapasitas Perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Menurut konteks pembangunan ekonomi, pemberdayaan Perempuan dipandang sebagai salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Perempuan tidak hanya berperan sebagai penopang ekonomi rumah tangga, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif dan sosial. Pandangan ini sejalan dengan konsep *gender mainstreaming* dalam pembangunan yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama, bukan sekedar objek kebijakan, guna mencapai kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan (*United Nations Development, 2015*).

Peran Perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya perhatian terhadap isu kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Kementerian Ketenagakerjaan mendorong berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses ke pasar kerja formal dan informal. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi Perempuan dan mengurangi kesenjangan gender dalam bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan rumah tangga. Di tingkat daerah, kebijakan pemberdayaan Perempuan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam berbagai program pemerintah kota. Melalui dukungan pelatihan, bantuan modal, serta pembinaan usaha kecil dan menengah, diharapkan perempuan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Meskipun demikian, efektivitas program pemberdayaan tersebut masih memerlukan evaluasi lebih mendalam, terutama dalam melihat sejauh mana kegiatan pemberdayaan benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga perempuan. (LP2KD Kota Payakumbuh, 2023).

Program-program pemberdayaan Perempuan di tingkat daerah umumnya difokuskan pada peningkatan keterampilan praktis seperti keterampilan menjahit, tata boga, tata rias, teknologi informasi, hingga pengembangan kewirausahaan. Melalui pelatihan tersebut, Perempuan diharapkan mampu memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar, membuka peluang usaha

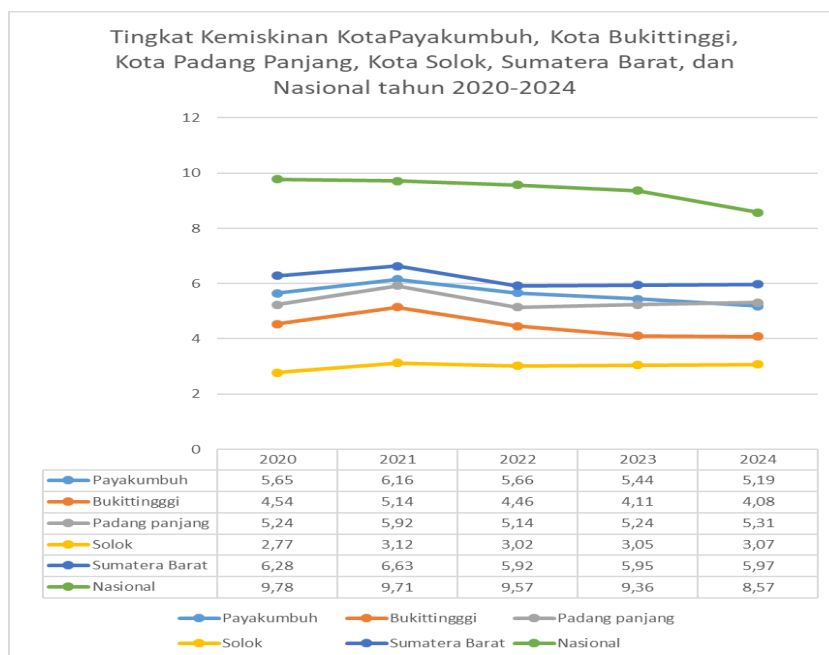
mandiri, serta meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian Widiastuti *et al.* (2024) yang menegaskan bahwa pelatihan kerja berbasis kebutuhan lokal mampu meningkatkan kemampuan teknis dan rasa percaya diri peserta perempuan, terutama dalam mengelola usaha kecil dan menengah.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas program pemberdayaan Perempuan di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Sebagian peserta pelatihan belum sepenuhnya mampu memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Hambatan yang muncul dapat berupa keterbatasan modal usaha, kurangnya jaringan pemasaran, serta minimnya dukungan dari lingkungan sosial dan keluarga. Menurut Bhuwania *et al.* (2024) keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak hanya ditentukan oleh aspek pelatihan, tetapi juga oleh ketersediaan ekosistem pendukung, seperti akses terhadap pembiayaan, pendampingan berkelanjutan, dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan gender. Demikian pula halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wignall *et al.* (2023) yang menyoroti pentingnya integrasi antara pelatihan kejuruan (*Technical and Vocational Education and Training/ TVET*) dengan kebijakan pemberdayaan sosial agar hasil dari proses pembelajaran lebih berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Tantangan-tantangan struktural seperti keterbatasan akses modal, literasi keuangan, dan jejaring usaha menunjukkan bahwa pemberdayaan Perempuan perlu dipandang sebagai proses berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan

ekonomi agar benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan wanita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Menurut Bhuwania *et al.* (2024) membuktikan bahwa pemberdayaan Perempuan melalui pendidikan dan pelatihan komunitas berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya meningkatkan pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga, tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Medjo Obia *et al.*, 2025).

Kota Payakumbuh menjadi salah satu wilayah yang sangat menarik untuk diteliti. Secara geografis dan ekonomi, Payakumbuh dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa yang berkembang pesat di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa tersebut seharusnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, namun, dinamika pembangunan ekonomi daerah tidak selalu berjalan seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi kemiskinan menjadi penting untuk memahami sejauh mana pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di Kota Payakumbuh berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pada tingkat rumah tangga (LP2KD Kota Payakumbuh, 2023).



Sumber: BPS Sumbar (2024)

Gambar 1. 1 Perbandingan tingkat kemiskinan kota Payakumbuh, kota Bukittinggi, kota Padang Panjang, kota Solok, Sumatera Barat, dan Nasional tahun 2020-2024.

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh selama periode 2020-2024 menunjukkan penurunan secara bertahap. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh tercatat sebesar 5,65 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,16 persen sebagai dampak kondisi ekonomi pasca pandemi. Selanjutnya, angka kemiskinan mulai menurun pada tahun 2022 menjadi 5,66 persen, kembali menurun pada tahun 2023 sebesar 5,44 persen, dan mencapai 5,19 persen pada tahun 2024 (BPS Kota Payakumbuh, 2024).

Penurunan yang terjadi relatif konsisten, dengan rata-rata penurunan sekitar $\pm 0,20$ persen per tahun, tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh masih tergolong lebih tinggi di dibandingkan beberapa kota lain di Provinsi Sumatera

Barat, seperti Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan di Kota Payakumbuh berjalan lebih lambat dibandingkan daerah lain, meskipun penurunan angka kemiskinan cukup signifikan.

Tingginya tingkat kemiskinan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan di Kota Payakumbuh belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penurunan kemiskinan yang relatif besar setiap tahunnya menunjukkan adanya upaya perbaikan kesejahteraan, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum optimal merasakan manfaat pembangunan ekonomi. Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi kondisi ini adalah belum maksimalnya peran perempuan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga, baik dari akses terhadap keterampilan, modal, maupun peluang usaha produktif.

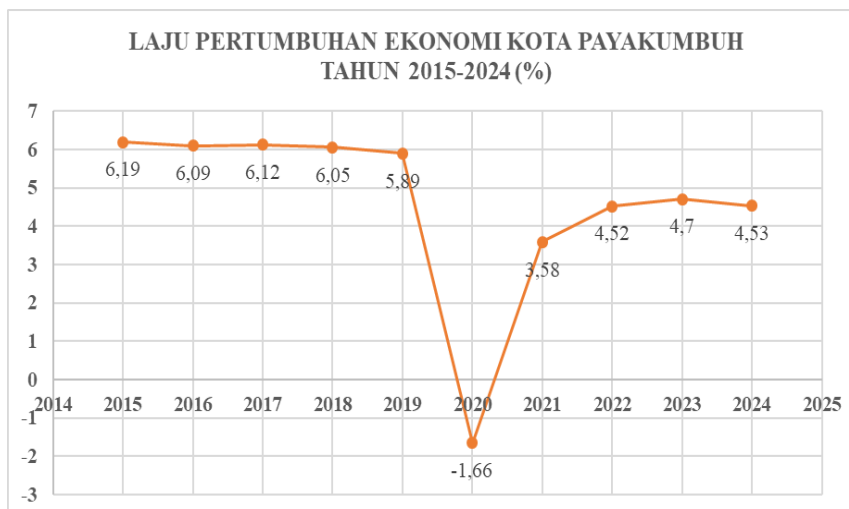
Pertumbuhan ekonomi secara teoritis memiliki keterkaitan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya beli rumah tangga, sehingga berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

Tingkat kemiskinan Kota Payakumbuh menunjukkan tren penurunan, posisinya masih relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah mampu berdampak secara nyata terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh digunakan untuk melihat konsistensi dan kualitas pertumbuhan ekonomi sebagai faktor pendukung penurunan kemiskinan (BPS Kota Payakumbuh, 2024).

Menurut data publikasi Kota Payakumbuh Dalam Angka 2025 dari BPS Kota Payakumbuh, jumlah penduduk kota ini pada tahun 2024 mencapai 146,73 ribu jiwa, dengan sekitar 64,12% diantaranya berada pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) (BPS Kota Payakumbuh, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi sumber daya manusia yang besar untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi apabila mampu diberdayakan secara optimal. Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, sebagaimana tercermin dari fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh selama periode 2015-2024.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh selama periode 2015-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada periode sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi relatif stabil di atas 5 persen, namun mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi mulai pulih secara bertahap, kondisi ini menggambarkan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh (data diolah)

Gambar 1. 2 Laju Prtumbuhan Ekonomi kota Payakumbuh tahun 2015-2024 (%)

Berdasarkan Gambar 1.2, laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2015-2019 relatif stabil dengan nilai diatas 5 persen per tahun. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -1,66 persen, yang mencerminkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi daerah, dampak ini berimplikasi langsung terhadap pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi rumah tangga (BPS Kota Payakumbuh, 2024).

Pada tahun 2021 hingga 2024, perekonomian Kota Payakumbuh menunjukkan proses pemulihan secara bertahap. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,58 persen pada tahun 2021, kemudian naik menjadi 4,52 persen pada tahun 2022 dan mencapai 4,70 persen pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan menjadi 4,53 persen (BPS Kota Payakumbuh, 2024). Pola ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan ekonomi telah berlangsung, tingkat pertumbuhan yang dicapai masih belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi.

Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi ini menjelaskan mengapa penurunan kemiskinan di Kota Payakumbuh berlangsung secara bertahap dan relatif lebih lambat dibandingkan beberapa kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi yang belum stabil dan belum sepenuhnya inklusif berpotensi membatasi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya pada kelompok rumah tangga rentan.

Kondisi ini memperkuat urgensi pemberdayaan perempuan sebagai salah satu strategi untuk memperluas basis pertumbuhan ekonomi di tingkat rumah tangga. Melalui peningkatan keterampilan, akses terhadap kegiatan produktif, dan penguatan peran ekonomi perempuan, dampak pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat lebih merata dan berkontribusi langsung terhadap penurunan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rumah tangga di Kota Payakumbuh.

Program pemberdayaan perempuan di Kota Payakumbuh memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama bagi Perempuan, agar lebih siap menghadapi dinamika pasar kerja dan menciptakan peluang wirausaha mandiri. Secara empiris, upaya ini sejalan dengan penelitian oleh Bhuwania *et al.* (2024) yang mengatakan bahwa pelatihan yang dikombinasikan dengan edukasi kewirausahaan mampu meningkatkan partisipasi sosial, produktivitas, dan kemandirian ekonomi Perempuan secara berkelanjutan. Pemberdayaan perempuan tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan ekonomi yang memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga serta pembangunan daerah. Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ini dapat menjadi

instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pembangunan ekonomi lokal di Kota Payakumbuh.

Menurut penelitian yang dilakukan Gul *et al.* (2025) menemukan bahwa di Balochistan, hanya sebagian peserta pelatihan yang mampu mengkonversi keterampilan menjadi usaha produktif karena kendala struktural seperti akses keuangan dan norma sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas melalui pelatihan belum cukup tanpa adanya ekosistem pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Penting untuk menelaah sejauh mana program-program pemberdayaan perempuan di Kota payakumbuh mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga, terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan dan kemandirian finansial perempuan.

Berdasarkan laporan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD), anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perubahan ini mencerminkan dinamika kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk program pemberdayaan perempuan dan keluarga. Berikut disajikan data perkembangan anggaran DP3AP2KB Kota Payakumbuh dari tahun 2021-2024.

Tabel 1. 1. Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Payakumbuh Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Total Anggaran (Rp)
2021	120.924.690,	111.058.786.857
2022	25.151.280,	109.748.243.353
2023	1.627.888.610,	118.610.357.461
2024	1.055.621.450,	98.163.669.854

Sumber : Laporan LP2KD Kota Payakumbuh (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa alokasi anggaran bagi DP3AP2KB mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, kemudian melonjak tajam di tahun 2023, dan kembali menurun di tahun 2024. Pola naik turun ini menggambarkan bahwa kebijakan pendanaan terhadap program pemberdayaan perempuan masih bersifat dinamis dan menyesuaikan prioritas pembangunan setiap tahun anggaran. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan anggaran untuk dinas besar, alokasi dana untuk DP3AP2KB masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pemberdayaan perempuan belum sepenuhnya menjadi fokus utama dalam kebijakan pengentasan kemiskinan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran perlu dilakukan secara berkelanjutan agar peningkatan dana benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan perempuan dan keluarga di Kota Payakumbuh (LP2KD Kota Payakumbuh, 2024).

Berbagai inisiatif pemberdayaan perempuan telah dilakukan di berbagai daerah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengentasan kemiskinan. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa tidak semua program pemberdayaan berhasil memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga perempuan. Beberapa kendala umum yang dihadapi antara lain keterbatasan akses terhadap modal usaha, minimnya jaringan pemasaran, lemahnya dukungan sosial, serta tantangan dalam menerapkan keterampilan yang diperoleh secara berkelanjutan. Menurut penelitian Memon *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa perempuan di sektor informal sering mengalami hambatan sosial dan budaya yang membatasi penerapan keterampilan pasca pelatihan,

sehingga potensi ekonomi mereka tidak sepenuhnya terealisasi Uddin & Barua (2024) juga menegaskan bahwa meskipun pelatihan kewirausahaan di Bangladesh berhasil meningkatkan kapasitas perempuan secara individu, dampak ekonomi rumah tangga baru terasa ketika pelatihan disertai akses pasar dan pendampingan lanjutan. Dari prespektif sosial-ekonomi, menurut Gómez-Valle & Holvoet (2022) menekankan pentingnya dukungan keluarga dan komunitas dalam memperkuat posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, efektivitas dari program pemberdayaan perempuan sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti motivasi, kualitas keterampilan, dan kapasitas wirausaha, serta faktor eksternal, termasuk akses modal, jaringan sosial, dan keberlanjutan kebijakan pemberdayaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi rumah tangga melalui pemberdayaan perempuan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik ini mengambil judul penelitian yang diajukan adalah “**Analisis Peranan Pemberdayaan Perempuan terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga: Studi Kasus Kota Payakumbuh**”, dengan tujuan menggali bagaimana pemberdayaan melalui dikelola, apa kendala yang dihadapi oleh peserta perempuan, dan seberapa besar dampaknya terhadap pendapatan serta kesejahteraan rumah tangga mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan Kota Payakumbuh dalam meningkatkan keterampilan peserta?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga peserta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis peranan pemberdayaan perempuan melalui program pelatihan Kota Payakumbuh dalam meningkatkan keterampilan peserta.
2. Menganalisis kontribusi pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga peserta.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk peneliti maupun pihak yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan peran pemberdayaan perempuan di Kota Payakumbuh. Manfaat ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan pengembangan kajian ilmiah mengenai pemberdayaan perempuan dan ekonomi rumah tangga, khususnya dalam konteks daerah perkotaan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti hubungan antara pemberdayaan perempuan, peningkatan keterampilan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merancang kebijakan atau program pemberdayaan perempuan yang lebih efektif dan berkelanjutan, terutama di bidang ekonomi dan peningkatan kapasitas keterampilan.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Lembaga Terkait

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat strategi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di tingkat lokal, baik melalui pelatihan, pendampingan usaha, maupun penguatan jaringan ekonomi perempuan.

3. Bagi Masyarakat dan Akademisi

Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya peranan perempuan dalam pembangunan ekonomi keluarga, serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas isu pemberdayaan ekonomi berbasis gender.

4. Bagi Peneliti.

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman tentang konsep dan praktik pemberdayaan perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan ekonomi rumah tangga.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis peranan pemberdayaan Perempuan terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga di Kota Payakumbuh. Objek

penelitian ini mencakup perempuan yang terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi, baik melalui pelatihan keterampilan, kegiatan wirausaha, maupun program komunitas perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait. Subjek penelitian ini adalah Perempuan yang telah mengikuti program pemberdayaan dan berupaya mengaplikasikan keterampilan atau pengalaman yang diperoleh dalam kegiatan ekonomi keluarga, seperti usaha mandiri, pekerjaan informal, atau kegiatan produktif rumah tangga lainnya.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Payakumbuh karena daerah ini menunjukkan dinamika ekonomi yang menarik, terutama dalam konteks peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi lokal. Ruang lingkup kajian difokuskan pada aspek sosial-ekonomi, meliputi proses pemberdayaan, dampak terhadap kesejahteraan rumah tangga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan perempuan.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini disusun agar memberikan gambaran mengenai proses penelitian, adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah dan fokus penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis. Dalam bab ini juga dijelaskan konsep pemberdayaan Perempuan, teori ekonomi rumah tangga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi rumah tangga melalui pemberdayaan perempuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Bab ini menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi, teknik analisis data dan uji keabsahan data melalui teknik *member check*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh dari proses pengumpulan data dan menganalisisnya berdasarkan teori serta penelitian terdahulu, bab ini mencakup gambaran umum lokasi penelitian, profil informan penelitian yaitu perempuan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, hasil analisis peranan pemberdayaan Perempuan terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, Implikasi penelitian, dan saran dari pihak terkait maupun penelitian selanjutnya sebagai bahan pengembangan penelitian.